

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ERA DESENTRALISASI FISKAL DI PROPINSI BANTEN PERIODE 2001:1-2009:4

Hendry Sulaiman Nasution

Quality Assurance PT. Bank Rakyat Indonesia

Email : hendry-sulaiman@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the factors that affect economic growth in the Province of Banten. This research was using the multiple linear regression analysis which is used to measured the pattern of the relationships between dependent variable and independent variables. The variable GRDP is a dependent variable and the independent variable are Income Original Region, General Allocation Fund, Fund Devide Result, Inflation, Foreign Investment, Domestic Investment, Government Spending and Labor. The estimation result of this model, showed that from 8 variables, there were 3 variables that insignificant which were inflation, foreign investment and domestic investment to influenced GRDP Province of Banten. Another five variables which were : Income Original Region, General Alocation fund, Fund Devide Result, Government spending and labour that significant to influenced GRDP. In the other hand, Goodness of fit of this model had a value of R^2 were 0,9867. From this model about 98,67% the Independent variables Income Original Region, General Allocation Fund, Fund Devide Result, Inflation, Foreign Investment, Domestic Investment, Government Spending and Labor expalained the relationship to GRDP of Banten. And about 1,32% will be explained by another variables that not obtained in this model.

Keywords : *Growth GRDP, Income Original Region, General Allocation Fund, Fund Devid Result, Inflation, Foreign Investment, Domestic Investment, Government Spending, Balance Fund*

PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat melakukan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan untuk memaksimalkan sumber daya ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah yang di realisasikan dalam Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan subsisten Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Peranan pemerintah adalah sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah pusat bermaksud untuk memberikan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk pemerintah daerah.

Masalah umum yang didapat dari pemerintah daerah adanya kendala di dalam memperoleh dana yang bersumber dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah cenderung bergantung dari sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Disadari bahwa ketergantungan itu tidak baik untuk kelanjutan untuk pendistribusian pembangunan daerah. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah memperdayakan potensi ekonomi yang diperoleh daerah masing-masing untuk

membayai pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri.

Secara teori, kebijakan desentralisasi fiskal cukup baik dalam tujuan pembangunan suatu bangsa atau daerah. Potensi distribusi desentralisasi fiskal terhadap laju pembangunan akan tergantung oleh ruang dan waktu, artinya dampak positif desentralisasi fiskal yang terjadi pada suatu negara atau daerah dalam waktu tertentu. Desentralisasi menjadi pilihan cara reformasi yang menarik berdasarkan beberapa argumentasi yaitu :

1. Desentralisasi dibidang pengeluaran akan meningkatkan efisiensi ekonomis, karena pemerintah daerah memiliki informasi lebih lengkap mengenai preferensi lokal sehingga memungkinkan layanan publik yang tidak seragam, namun lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
2. Desentralisasi diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
3. Dengan adanya akuntabilitas, dapat diharapkan masyarakat pembayar pajak akan lebih kooperatif terhadap pemerintah daerah. Namun demikian, Vito Tanzi Washington Dc (2000) mengingatkan bahwa efektifitas desentralisasi fiskal dalam memperbaiki efisiensi alokasi tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran negara, sejauh mana privatisasi dilakukan oleh pihak swasta, kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi pendapatan, transparansi dan kapasitas administratif serta kelembagaan

pemerintah daerah. Alasan utama pelaksanaan desentralisasi tersebut untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, kebijakan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih baik.

Terdapat beberapa alasan sebagai warga negara kenapa pemekaran wilayahsekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu: *Pertama*, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terstruktur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah padaskala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan tersedia. *Kedua*, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikembangkan daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali

berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergal. *Ketiga*, tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang teknologi dan pemerintahan.

Kenyataan politik seperti tersebut diatas mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi yang barubai secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak adanya pemekaran wilayah.

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB. Selain memperlihatkan sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian melalui struktur ini juga dapat dilihat ke arah mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam studi ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara DBH terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi terhadap

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?

5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?
6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?
7. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?
8. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi Banten ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desentralisasi Fiskal

Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menciptakan desentralisasi berarti akan terjadi pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dalam hal pembelanjaan, pemberian kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh

DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002).

Desentralisasi fiskal lebih menekankan pada tiga proses yang berhubungan yaitu devolusi, delegasi dan konsentrasi. Masing-masing dari itu, menurut Meloche, Vaillancourt dan Yilmaz (2004) mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Devolusi (*Devolution*), yaitu pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dan pihak pemerintah daerah mendapat *diskreasi* yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat. Dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah pusat akan memberikan *supervise* secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi politik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya, termasuk meningkatkan pajak daerah.
2. Pendelegasian (*Delegation or institutional pluralism*), yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu (pelayanan) kepada organisasi yang berada diluar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat.
3. Dekonsentrasi (*Decocentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam

garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah.

Menurut Oates (2003). Seperti yang dikutip Sidik (2002a) bahwa dalam dunia dengan sedikit eksternalitas dan perasaan heterogen, pemerintah lokal adalah yang terbaik menyediakan jasa layanan umum bagi penduduk lokal sebab mereka lebih dapat mengadaptasi perbedaan dalam cita rasa secara lebih baik yang disebabkan mereka memiliki keuntungan informasi mengenai cita rasa itu dibandingkan dengan pemerintah pusat. Ini pula yang dimaksud dengan *Oates Decentralization Theorem*. Alokasi efisiensi dari jasa layanan lokal berarti pemerintah yang lebih rendah menyediakan jasa sampai pada suatu titik yang manajemennya ditempatkan pada unit terakhir dari jasa untuk penduduk yang bersedia membayar sama dengan keuntungan yang didapat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah yang lebih rendah (pemerintah daerah) harus bebas untuk mengusahakan sumber pendapatannya sendiri (pajak) untuk menyesuaikan dengan preferensi penduduknya dalam pengeluaran. Ini yang kemudian disarankan sebagai hubungan antara efisiensi dengan otonomi fiskal (Meloche, Vaillancourt, dan Yilmaz 2004).

Pengertian Desentralisasi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti pengolahan daerah lebih dititik beratkan kepada kabupaten/kota, sedangkan Propinsi adalah sebagai daerah otonom sekaligus sebagai daerah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Propinsi merupakan daerah atasan kabupaten/kota. Jadi antara daerah otonom kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hirarki.

Menurut (Rondenely, 2000) desentralisasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Desentralisasi politik (*Political Decentralization*) dan Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*).

Desentralisasi Ekonomi (*Economic Decentralization*)

Desentralisasi Ekonomi adalah tahapan berikut dari proses desentralisasi di Indonesia. Daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi lokal sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Prinsip dasar dari desentralisasi ekonomi adalah kemampuan daerah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta kemampuan institusi daerah. Pada tahap awal harus tercipta mekanisme pengawasan di tingkat lokal. Mekanisme kontrol yang paling efektif adalah melalui pilihan masyarakat, yakni sekali dalam lima tahun para pemilih lokal menentukan siapa yang pantas menjadi kepala daerah, yang bertanggung jawab memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai persaingan ekonomi yang sehat antar daerah. Persaingan antardaerah tidak berarti menjadikan suatu daerah bergerak sendiri, tetapi memaksa daerah belajar mengukur kemampuannya.

Untuk memperkuat skala ekonomi, daerah yang perekonomiannya kecil dapat bekerjasama dengan daerah lain. Inisiatif mendorong kerja sama antarkabupaten/kota yang bertetangga atau berdekatan dapat dilakukan pemerintah propinsi.

Implementasi desentralisasi ekonomi hanya dapat terjadi apabila pemerintah daerah melaksanakan dengan baik lima kewajiban dasarnya. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya berdasarkan potensi yang dimiliki serta sebanyak mungkin melibatkan peran serta pelaku ekonomi lokal. Kedua, mengupayakan perbaikan pendapatan masyarakat dengan mengutamakan prinsip keadilan. Kelompok yang mampu diberi kemudahan untuk terus memperbaiki pendapatannya, yang tidak mampu diberi subsidi terarah yang mendidik. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru sebanyak mungkin dengan mengundang sebanyak banyaknya investasi baru di daerah, terutama yang berpotensi menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Keempat, ikut menjaga laju inflasi di daerah dengan memperbaiki jaringan distribusi serta kepastian pasokan bahan pokok. Kelima, memberikan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan

infrastruktur dasar dengan standar setara atau di atas standar minimum nasional.

Landasan Teori Transfer Pusat ke Daerah

Sistem transfer yang dipakai di Indonesia saat ini adalah hasil evolusi sepanjang kurun waktu lebih dari 50 tahun. Sampai dengan tahun 1956, sistem subsidi yang dipakai adalah sistem *sluit post*, yaitu suatu bentuk subsidi yang memberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya rencana pengeluaran dan rencana penerimaan yang diajukan daerah kepada pusat. Akan tetapi dalam praktiknya, sebenarnya yang dijalankan bukanlah sistem *sluit post* murni. Pemberian tunjangan kepada daerah sangat tergantung kepada kebijaksanaan sepihak Pemerintah pusat. Tahun 1956, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan, yaitu sejak Undang-Undang nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang ini, secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diterjemahkan ke dalam tiga hal utama, yaitu:

1. Penyerahan sumber pendapatan Negara kepada daerah.
2. Pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak Negara kepada daerah.
3. Memberikan ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada satu periode.

PDRB dihitung dalam dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Dalam menghitung PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan, sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). Penghitungan PDRB saat ini menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Penggunaan tahun dasar ini ditetapkan secara nasional

Definisi Penanaman Modal Asing

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut (Kamaludin, 2006).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Yang bertujuan untuk memberikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biayanya tinggi. Ekonomi biaya tinggi adalah proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya akibat adanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan – pungutan liar yang seharusnya tidak ada serta sebagai akibat 'budaya korupsi'. Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor. Yang dimaksud adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan propinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu DBH Pajak dan DBH sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum

Dana adalah dana Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom dalam bentuk blok. Artinya penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri oleh daerah, Penggunaan DAU diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar kepedasyarakat daerah. DAU ini dianggap pengganti subsidi daerah otonom dan danainpres dimasa lalu. Dalam Hal PAD masih mengacu pada peraturan yang masih berlaku mengenai pajak dan retribusi daerah.

Definisi Penanaman Modal Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam negeri secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut

Definisi Inflasi

Merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh manusia yang hidup dalam ekonomi uang, dimana daya beli yang ada dalam uang dengan berjalannya waktu mengalami erosi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi,

kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. (Boediono, 2000: 161).

Teori Pengeluaran Pemerintah

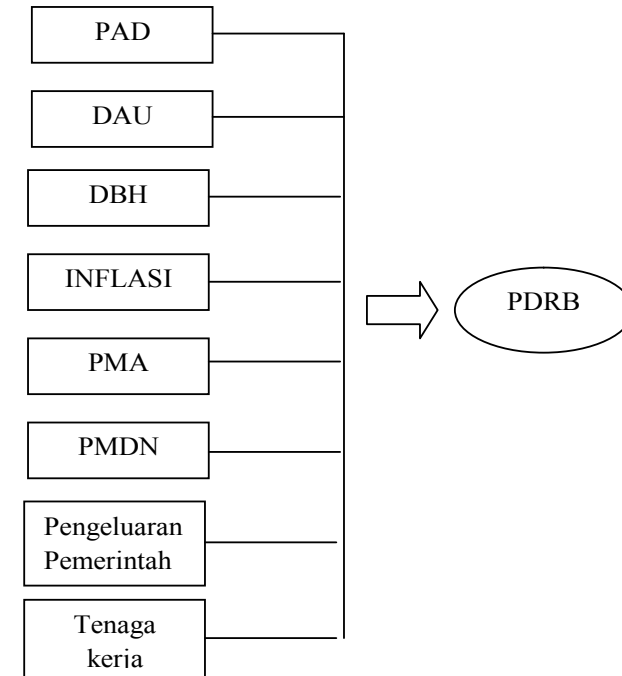
Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002).

Teori Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan, dijelaskan dalam pasal 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat

Konsep Pertumbuhan ekonomi

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan per kapita harus dianalisa dari output totalnya dan jumlah penduduknya (Boediono, 2000).



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Penelitian Terdahulu

Waluyo, Joko (2007) telah melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah model ekonometrika persamaan simultan dengan menggunakan data panel antar propinsi tahun 2001-2005, dengan (TSLs).

Priyo, Hari, Adi (2006) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah,

belanja pembangunan dan pendapatan Aslidaerah di Kabupaten/kota se Jawa-Bali. Data yang digunakan dalam analisisnya adalah data APBD realisasi pemerintah kabupaten dan kota tahun 1998-2003.

Sasana, Hadi (2005) telah melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan *Pooled least Square* (PLS) dengan rentang waktu 2001-2003.

Abdullah dan Halim (2003) telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Studi kasus yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Hasil temuannya adalah sebagai berikut DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Wicaksono, Deky Bayu (2006) telah melakukan penelitian terhadap Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah model regresi Linear Berganda dan Pelanggaran Asumsi Klasik Periode 1990-2008.

Rumusah Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha : PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha4 : Inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha5 : Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha6 : Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha7 : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha8 : Tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu metode yang mengukur besarnya pengaruh variabel terikat (*dependent*) terhadap variabel bebas (*independen*) dengan menggunakan variabel *independent* lebih dari satu.

Model yang digunakan akan diestimasi ke dalam model OLS (*Ordinary Least Square*) pertimbangan akan digunakan model ini karena mempunyai keunggulan secara teknis sangat kuat dan mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya di samping itu karena sifat penaksiran OLS yang bersifat *Blue (Best Linear Unbiased Estimator)* dimana dalam kelas penaksir tidak biasa mempunyai varians yang minim (Gujarati, 2000).

Agar model memberikan estimasi terbaik atau BLUE maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Model dikatakan BLUE jika tidak terdapat masalah multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas serta data yang digunakan terdistribusi normal. Setelah model BLUE, untuk mencapai tujuan penelitian maka perlu dilakukan pengujian statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder, data yang dikumpulkan diolah dalam memecahkan

suatu permasalahan, data tersebut berasal dari buku Banten dalam angka (*Banten Infigures*), Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Jakarta, Dinas Pendapatan dan Keuangan Asset Daerah Banten. Data yang digunakan adalah data periode tahun 2001:1-2009:4. Model yang digunakan penelitian, adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a_t + a_1X_{1t} + a_2X_{2t} + a_3X_{3t} + a_4X_{4t} + a_5X_{5t} + a_6X_{6t} + a_7X_{7t} + a_8X_{8t} + e_t$$

Dimana:

Y = PDRB

a = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = PAD

X2 = DAU

X3 = DBH

X4 = Inflasi

X5 = Penanaman modal asing

X6 = Penanaman modal dalam negeri

X7 = Pengeluaran pemerintah

X8 = Tenaga Kerja

e = estimasi eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kausalitas Data

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengolahan data terhadap model regresi untuk mendapatkan persamaan atau model yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan hasil yang signifikan. Besarnya nilai

signifikansinya adalah 0.536333 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti H_0 diterima dan dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa terdapat multikolinieritas dimana jika hubungan antara X_i dan $X_j > 0.7$ maka H_0 diterima, H_a ditolak, jadi ada multikolinieritas dan variabel yang terdapat multikolinieritas adalah variabel DAU terhadap PAD sebesar 0,8224331, Pengeluaran pemerintah terhadap PAD sebesar 0,880112, Pengeluaran Pemerintah terhadap DAU sebesar 0,916611, Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi sebesar -0,709820, dan Tenaga Kerja terhadap Inflasi sebesar -0,894630, selanjutnya diperlukan adanya penyembuhan. Penyembuhan dilakukan dengan menggunakan uji wald tes dan dapat hasilnya tidak terdapat multikolinieritas.

c. Uji Autokolinieritas

Dari hasil uji LM dapat diketahui bahwa hasil probabilitas $obs * R^2$ sebesar 0.013200 < 0.05, dimana model tersebut terdapat autokorelasi. Setelah dilakukan penyembuhan masih ditemukan Autokolinieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji white diatas hasil probabilitas $obs * R^2$ sebesar 0.028088 < 0.05 dimana model tersebut terdapat ada hetero, sehingga diperlukan adanya penyembuhan heteroskedastisitas. Penyembuhan dilakukan

dengan menggunakan uji Gletser sehingga didapatkan $0.0604 > 0.05$.

2. Pengujian Model

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 1, maka di peroleh hasil sebagai berikut :

Hasil R^2 sebesar 0.986783 menunjukkan bahwa perilaku dari variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Inflasi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja mampu mempengaruhi variabel PDRB sebesar 98,6783 dan sisanya sebesar 1.3217 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hipotesis 1

Ho1 : PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha1 : PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0168 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.0168 < 0.05$), maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 2

Ho2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0074 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.0074 < 0.05$), maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 3

Ho3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0000 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$), maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 4

Ho4 : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha4 : Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.1193 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.1193 > 0.05$), maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 5

Ho5: Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha5: Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.5209 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.5209 > 0.05$), maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 6

Ho6 : Penanaman Modal Dalam Negeri negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha6 : Penanaman Modal Dalam Negeri positif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.7239 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.7239 > 0.05$),

maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 7

Ho7: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha7: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0004 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.0004 < 0.05$), maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Hipotesis 8

Ho8 : Tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Ha8 : Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, dengan probabilitas sebesar 0.0266 yang nilainya lebih kecil dari dibandingkan $\alpha = 5\%$ ($0.0266 < 0.05$), maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Dari tabel 1, diperoleh probabilitas uji $F 0.000000 < 0,05$, dengan demikian secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Inflasi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat dikatakan model yang digunakan dalam penelitian ini sudah fit.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten Tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 1, hasil penelitian menunjukkan hasil estimasi tersebut sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan positif dan signifikan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah Banten akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah berniatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dari peranannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 2, hasil penelitian menunjukkan hasil estimasi pengaruh DAU terhadap pertumbuhan PDRB sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan positif dan signifikan. Dalam desentralisasi perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan penyerahan sumber-sumber keuangan yang memadai kebijaksanaan ini tidak hanya menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi lebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada PAD, namun perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan potensi penerimaan daerah hanya dapat dilaksanakan jika daerah mendapat sumber pendapatan yang potensial.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 3, hasil penelitian menunjukkan estimasi DBH sesuai dengan hipotesisnya yang

menyatakan positif dan signifikan pengaruhnya terhadap PDRB. Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dengan sistem pembagian DBH yang bersumber dari pajak dan SDA, mekanisme bagi hasil SDA dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal pusat dan daerah.

Pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 4, hasil penelitian menunjukkan estimasi tidak sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Teori inflasi menyatakan inflasi berhubungan secara negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto, apabila laju inflasi atas nilai barang dan jasa masyarakat meningkat maka akan menyebabkan pertumbuhan PDRB turun.

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 5, hasil penelitian menunjukkan estimasi tidak sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan positif dan signifikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak pemerintah daerah Propinsi Banten untuk mengoptimalkan peningkatan PMA dengan

memberikan iklim investasi yang lebih kondusif. Beberapa diantaranya dengan melakukan efisiensi perizinan atau regulasi kebijakan di bidang investasi, jaminan hukum dan ketertiban berusaha, atau bahkan memberikan insentif atau tax holiday bagi investasi yang padat karya, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Basuki dan Sulistyono (1997) dan Alkadri (1999) yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten Tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 6, hasil penelitian menunjukkan hasil estimasi tidak sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan positif dan signifikan. Pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Banten. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum dan berbagai peraturan daerah yang tidak probisnis diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluarkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi, ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan baik resmi maupun liar. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Banten adalah

ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastiaan kebijakan, korupsi, perizinan usaha dan regulasi pasar tenaga kerja.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 7, hasil penelitian menunjukkan hasil estimasi Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Dalam konsep ekonomi makro Pengeluaran pemerintah akan meningkatkan perekonomian nasional. Pengeluaran Pemerintah yang mendorong perekonomian ini dengan asumsi bahwa Pengeluaran Pemerintah digunakan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi atau yang memberikandorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Jadi apabila Pengeluaran Pemerintah meningkat maka akan terjadi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Pengaruh Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Banten tahun 2001-2009

Berdasarkan hipotesis 8, hasil penelitian ini menunjukkan tenaga kerja positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini terutama disebabkan karena Tenaga Kerja yang digolongkankedalam angkatan kerja yang bekerja di sektor perekonomian di Propinsi Banten merupakan faktor

produksi yang menggerakkan perekonomian daerah, selain itu jumlah tenaga kerja yang besar dengan produktifitas yang tinggi merupakan salahsatu pendorong positif dalam mempercepat ekonomi di Propinsi Banten

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa, ada 3 variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto propinsi banten pada tahun 2001-2009. Ketiga variabel tersebut adalah Inflasi, Penanaman Moda Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Secara serentak atau uji F statistik, seluruh variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent. Dan seluruh variabel bebas alam penelitian mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 98,74% sedangkan sisanya di jelaskan oleh variabel di luar model.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka saran untuk hasil penelitian ini adalah Pemerintah Propinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan sumber daya yang ada supaya hasilnya dapat meningkatkan anggaran pendapatan belanja daerah Propinsi Banten. Untuk meningkatkan potensi yang ada di Propinsi Banten dapat dilakukandengan melalui mengintensifkan promosi melalui media, antara lain televisi, radio, majalah,

bulletin, dan internet. Pemerintah daerah Propinsi Banten dapat melatih dan mendidik sumber daya manusia supaya dapat mengelola keuangan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Halim, A (2003). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah; Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali", Simposium Nasional Akuntansi. Surabaya.
- Adi, Priyo Hari (2006). "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota se Jawa- Bali)", Simposium Nasional Akuntansi. Padang.
- Akai, Nobuo dan Masayo Sakata (2005) "Fiscal Decentralization, Commitment and Regionality Inequality: Evidence from State level Cross-Sectional Data for the United States, " Dirje Discussion paper, January
- Bird, (2001). Decentralization of the Socialist State, Intergovernmental Finance in Transition Economics, World Bank Regional and Sectoral Studies.
- Biro Pusat Statistik. Banten Dalam Angka, BPS berbagai edisi.
- Biro Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto, BPS berbagai edisi.

- Boediono, (2004). Ekonomi moneter, edisi 3, BPFE : Yogyakarta
- Gujarati, Damodar (2000). Ekonometrika Dasar, Erlangga : Jakarta
- Guritno, (2002), Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta
- Jhingan, ML. (2008). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kamaludin, Rustian (2006). Beberapa Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah Dan Hubungan Ekonomi Keuangan Luar Negeri. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti. LPEM FEUI (2003). Regional and local Analysis rencana pertama, Jakarta.
- Mangkoesobroto. (2002). Ekonomi Publik. Yogyakarta. BPFE
- Musgrave, Richard A. (2000). "Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek" Edisi 5, Jakarta: Erlangga
- Meng, Chih-Cheng (2005) "Assesing the Effect of Desentralization on Economic Inequality, Human Development, and Economic Growth : Asimultaneous- Equation Models Analysis," paper prepared for delivered at the Midwest political science Association Annual Meeting, Chicago, April 7-10.
- Nicholson, Walter. (2002). Micro ekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga
- Nopirin, (2001). "Ekonomi Moneter": Buku 1&2 BPFE, Yogyakarta

Oates, (2003). "Fiscal Decentralization and Economic Development and Economic Development," National Tax Journal 46 (2), halaman 237-247

Robert A, Simanjuntak (2008) "Fiscal Desentralization: Stock Taking Study 2008", Draft laporan tidak diterbitkan, Democratic Report Suport Program, USAID, 2008

Rondinelli, Dennis A (2000). Planning Development Project. Boston: Little Brown and Company

Sasana, Hadi (2005). "Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, antar Sektor di Kabupaten/Kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.12 No.2, September 2005.

Sidik, Mahfud (2001). Pembangunan keuangan pusat dan daerah dalam proses Otonomi Daerah. Workshop manajemen penerimaan daerah, Yogyakarta Soemitro, Rochmat (2000). "Azas dan Dasar Perpajakan 1". Bandung : PT Eresco.

Sukirno, Sadono (2004). "Pengantar Teori Ekonomi Makro", Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suparmoko (1992) . Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi keempat BPFE, Yogyakarta

Syofyan, Syofrizza (2008). "Modul Ekonometrika II. BPFE Trisakti". Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomer 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah Vasques, Jorge Martinez dan Robert M. McNab (2001). "Fiscal Desentralization and Economic Growth," (Andrew young School of policy Studies, Georgia State University)" International Studies Program.

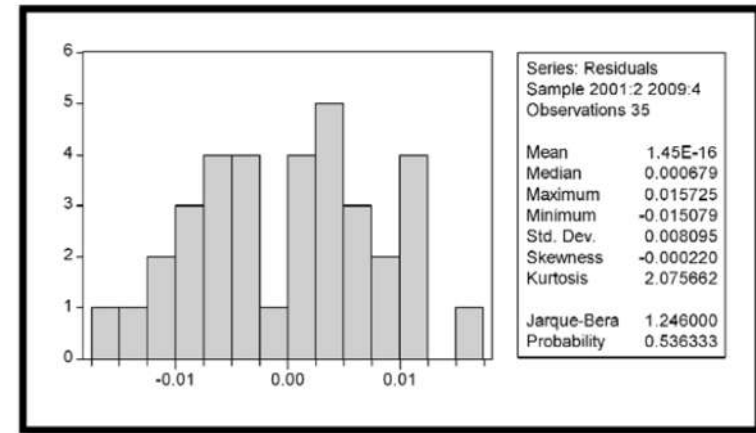
Vito Tanzi, "On Fiscal Federalism: Issues to Worry About", Catatan Konferensi tentang Desentralization Fiskal, IMF, Fiscal Affairs Departement, Washinton DC, 2000.

Wicaksono, Deky Bayu (2006). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Jawa Barat". Skripsi.

Xing- Qiao, Ping (2000) Fiscal Decentralization in Chinese Economic Reform, China Center for Economic Research, January

Meloche, Jean-Philippe, Francois Vailaincourt dan Serdar Yilmaz (2004) Decentralization or Fiscal Autonomy? What does really matter ? Effects on Growth and Public sector size in European Transition Countries, World Bank Policy Research working paper no 3254, Maret

LAMPIRAN



Gambar 2
Uji Normalitas

Tabel 3
Autokoletrasi Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	5.321010	Probability	0.029638
Obs*R-squared	6.142122	Probability	0.013200

Tabel 4
Heteroskedastisitas Test

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	4.866648	Probability	0.000917
Obs*R-squared	28.42835	Probability	0.028088

Tabel 1
Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG(PDRB)				
Method: Least Squares				
Date: 03/10/12 Time: 10:10				
Sample: 2001:1 2009:4				
Included observations: 36				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.263138	0.049953	45.30559	0.0000
PAD	0.286286	0.112347	2.548238	0.0168
DAU	1.146131	0.396073	2.893734	0.0074
DBH	0.773002	0.160169	4.826160	0.0000
INFLASI	0.000278	0.000173	1.608904	0.1193
PMA	-0.012910	0.019847	-0.650447	0.5209
PMDN	2.32E-05	6.49E-05	0.357015	0.7239
PM	8.87E-05	2.21E-05	4.015306	0.0004
TK	0.049551	0.021130	2.345028	0.0266
R-squared	0.987454	Mean dependent var	2.678025	
Adjusted R-squared	0.983736	S.D. dependent var	0.141268	
S.E. of regression	0.018016	Akaike info criterion	-4.982811	
Sum squared resid	0.008763	Schwarz criterion	-4.586931	
Log likelihood	98.69060	F-statistic	265.6275	
Durbin-Watson stat	0.459260	Prob(F-statistic)	0.000000	

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DBH	INFLASI	PMA	PMDN	PM	TK
PAD	1.000000	0.822431	0.013186	-0.601691	0.488552	0.414491	0.880112	0.459063
DAU	0.822431	1.000000	0.338348	-0.628148	0.582437	0.362346	0.916611	0.576682
DBH	0.013186	0.338348	1.000000	-0.458897	0.408223	-0.051675	0.420277	0.429146
INFLASI	-0.601691	-0.628148	-0.458897	1.000000	-0.646952	-0.228559	-0.709820	-0.894630
PMA	0.488552	0.582437	0.408223	-0.646952	1.000000	0.182385	0.565452	0.665638
PMDN	0.414491	0.362346	-0.051675	-0.228559	0.182385	1.000000	0.378296	0.175888
PM	0.880112	0.916611	0.420277	-0.709820	0.565452	0.378296	1.000000	0.616183
TK	0.459063	0.576682	0.429146	-0.894630	0.665638	0.175888	0.616183	1.000000

